MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN MENGANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

SKRIPSI

NETI OKTAVIANTY

NIM. B1031211072

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	: Neti Oktavianty
NIM	: B1031211072
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul	: Menilai Kinerja Keuangan Pemrintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Menggunakan Konsep *Value For Money*
Skripsi	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan Judul tersebut diatas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalam terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut diatas.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 4 Maret 2025



Neti Oktavianty

NIM. B1031211072

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Neti Oktavianty
NIM	: B1031211072
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	: 20 Februari 2025
Judul Skripsi	: Menilai Kinerja Keuangan Pemrintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Menggunakan Konsep *Value For Money*

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 4 Maret 2025



Neti Oktavianty

NIM. B1031211072

LEMBAR YURIDIS

MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN MENGANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Penanggung Jawab Yuridis

Neti Oktavianty
B1031211072

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 20 Februari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1.	Ketua Penguji	Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak.	5/3/2025	
		NIP. 196808211997021003		
2.	Sekretaris Penguji	Ira Grania Mustika, S.E., MM.	5/3/2025	
		NIP. 196911151996032002		
3.	Penguji 1	Sari Rusmita, S.E., M.M.	5/3/2025	
		NIP. 198109162006042001		
4.	Penguji 2	Ika Nur Azmi,S.E., M.Ak., Ak.	5/3/2025	
		NIP. 199003152023212050		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Dr. Khistina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 197906182002122003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu selesai mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Menggunakan Konsep *Value For Money*". Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Strata S1 Universitas Tanjungpura Pontianak.

Berkat doa, bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Alwi dan Ibu Armawati yang selalu memberi cinta, dukungan dan doa yang terbaik.
2. Saudara-saudara tersayang, Novi Lestari, A.Md. AB., Resi Ternando, Fitri Ramadhani yang selalu mambantu dan mendukung cita-cita penulis.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA, CPA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Kristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi dan Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu dan bersedia memberikan saran, bimbingan, dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Ira Grania Mustika, S.E., MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa meluangkan waktu dan bersedia memberikan saran, bimbingan, dan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Sari Rusmita, S.E., M.M., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan ide serta saran untuk kesempurnaan skripsi yang telah disusun serta meluangkan waktunya untuk hadir dalam Sidang Skripsi dan Komprehensif penulis.

9. Ibu Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan ide serta saran untuk kesempurnaan skripsi yang telah disusun serta meluangkan waktunya untuk hadir dalam Sidang Skripsi dan Komprehensif penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura terutama para Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat selama masa aktif perkuliahan.
11. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Kebersihan dan Keamanan serta semua pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu selama masa aktif perkuliahan.
12. Para Sahabat penulis, Ayuni Syawala, Nur Adelia Agustin, dan Suci Nuriah yang selalu mememani dan mendukung penulis dari Madrasah Tsanawiyah.
13. Para Sahabat perkuliahan penulis, Listiani Wulandari, Yasmin Alya Hanifadhila, Dila Ardita Rachmania, Laili Fitri Wulandari, Pamela Tri Januari yang mewarnai masa perkulihan penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dari sisi penulisan maupun penelitian. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dan kebermanfaatan skripsi yang telah disusun.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Pontianak, 4 Maret 2025



Neti Oktavianty

NIM. B1031211072

MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN MENGANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Oleh :

NETI OKTAVIANTY

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan konsep *value for money*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2019 sampai dengan 2023. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek ekonomi, (2) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efisiensi, (3) Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efektivitas.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2019 sampai dengan 2023 dari aspek ekonomi masuk dalam kriteria ekonomis. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mampu melakukan penghemantan dengan rasio ekonomis. Pada aspek efisiensi, Kinerja Keuangan Provinsi Kalimanta Barat berada pada kriteria kurang efisien di tahun 2019. Pada tahun 2020 berada pada kriteria cukup efisien. Pada tahun 2021 berada pada kriteria kurang efisien dan pada tahun 2022 dan 2023 berada pada kriteria cukup efisien. Pada aspek efektivitas, Kinerja Keuangan Provisi Kalimantan Barat berada pada aspek sangat efektif pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kriteria efektif. Pada tahun 2022 berada pada kriteria sangat efektif dan pada tahun 2023 berada pada kriteria efektif.

Kata Kunci : kinerja keuangan, *value for money*, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

RINGKASAN SKRIPSI

MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN MENGANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MENGGUNAKAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

1. Latar Belakang

Pembahasan mengenai sektor publik di Indonesia tidak bisa lepas dari keuangan negara. Dalam beberapa waktu terakhir, kemajuan pesat dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia bersamaan diterapkannya otonomi daerah. Istilah otonomi daerah bukan lagi hal yang baru, otonomi daerah telah dinyatakan dalam Undang-Undang Konstitusi 1945. Berawal sejak bulan Januari 2001 hampir semua kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah. Namun ada beberapa bidang yang dikecualikan, yaitu Kebijakan Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Keadilan, Keuangan dan Agama. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Hak otonomi pada tiap masing masing daerah diberi kebebasaan dalam mengelola dan menambah sumber pendapatan daerah guna mendorong pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat tersebut. Tujuan dari otonomi daerah yaitu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya lebih efisien dan responsif terhadapat kebutuhan, potensi dan karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah dapat memberikan dampak yang bervariasi terhadap perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Pemerintah daerah wajib untuk melaporan pertangungjawaban kepada masyarakat, masyarakat akan menilai apakah manajemen keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan sesuai atau tidak.

Dalam penerapan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang kendali penuh atas mengelola keuangan, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah mengharuskan meraka untuk berperan secara aktif dalam merancang, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi kemajuan dan kesejahteraan wilayah masing-masing. Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memegang tanggung jawab sepenuhnya untuk mengambil keputusan yang dapat berdampak langsung pada pembangunan dan pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan yang bersifat administrarif, tetapi juga mencakup rencana pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan finansial dan persyaratan administratif yang berlaku. Peran aktif pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola anggaran ini sangat penting, karena APBD adalah instrument utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu dalam penyusunana APBD dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini bertujuan agar anggaran yang

dialokasikan dapat mencapai tujuan pembangunan yang produktif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan mengelola anggaran secara efektif dan efisien, pemerintah tidak dapat hanya memperbaiki kinerja keuangan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonami daerah. Oleh karena itu pengelolaan yang tepat dan strategis terhadap anggaran daerah menjadi sangat krusial, agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dan berkelanjuatan untuk kesejahteraa masyarakat. Inilah mengapa perhatian terhadap aspek ekonomi, efiiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Pegukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah perlu dilaksanakan guna untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, serta guna menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam usaha mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan sasaran. Kinerja pemerintah bukan hanya diukur keberhasilannya dari segi *output* yang diperoleh saja, namun juga memperhitungkan *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dilakukan dengan mengaplikasikan konsep *value for money*. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Agar pengelolaan dana publik *(public money)* dapat berjalan baik dan sejalan dengan prinsip *value for money*, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sistem yang baik yang dimaksud yaitu harus mampu mengelola anggaran secara optimal, sehingga setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang signifikan. Metode *value for money* dalam pengelolaan anggaran daerah dapat terwujud jika pemerintah daerah mempunyai sistem akuntansi yang terstruktur dengan baik. Sistem akuntansi yang efektif akan memudahkan pemantauan dan pelaporan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap dana yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *value for money* berfungsi sebagai indikator yang dapat memberikan informasi tentang apakah anggaran (dana) menghasilkan manfaat atau nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator utama dalam konsep ini yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Kalimantan Barat, dengan segala potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan keragaman budaya yang kaya, memiliki kesempatan unik untuk menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan pemerintah, khusunya melalui evaluasi terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Dalam lima tahun terakhir ini provinsi Kalimantan barat telah menghadapi dinamika yang sangat signifikan, termasuk perubahan kebijkan, fluktuasi ekonomi global, dan dampak pandemik COVID-19. semua ini tentunya sudah mempengaruhi cara pemerintah mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Sebab itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai kinerja keungan pemerintah daerah dengan berbasis pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efktivitas.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek ekonomi?
b. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efesiensi?
c. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari efektivitas.?

3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek ekonomi.
b. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efisiensi.
c. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efektivitas.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan konsep *value for money*. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2019 sampai dengan 2023. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengaplikasikan konsep *value for money* berdasakan tiga elemen, yaitu:

a. Ekonomi
   Teknik pengukuran ekonomis berfokus pada membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dan anggaran yang disetujui, dengan tujuan untuk memaksimalkan *output* yang dihasilkan dari *input* yang tersedia. Proses ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dapat memberikan nilai ekonomis.
b. Efisiensi
   Konsep efisiensi ini menekankan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penggunaan sumber daya harus dilakukan secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh dapat tercapai dengan pengeluaran atau konsumsi sumber daya yang seefisien mungkin. Dapat dikatakan, kegiatan atau program dianggap efisien jika hasil atau produk yang diinginkan bisa dicapai dengan pemanfaatan sumber daya dan dana yang seminimal mungkin, tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan utama dari program tersebut.
c. Efektivitas
   Efektivitas dapat dipahami sebagai suatu proses pengukuran yang dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dinginkan (target) dengan hasil yang sebenarnya dicapai (realisasi). Dalam hal ini, hasil yang diinginkan (target) merujuk pada *outcome*, yaitu dampak atau perubahan yang diharapkan terjadi

sebagai akibat dari pelaksanaan suatu program, kebijakan, atau aktivitas. Sementara itu, hasil yang sebenarnya tercapai (realisasi), yang sering disebut *output* mencakup produk atau hasil konkret yang dihasilkan dari pelaksanaan program atau kegiatan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

5. Hasil Penelitian

a. Perhitungan Rasio Ekonomi untuk tahun anggaran 2019 sampai 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten berada dalam kriteria "ekonomis' pada periode tersebut. Hal ini tercermin dari rasio ekonomi yang selalu menunjukkan nilai dengan rata-rata rasio sebesar 93,29% sepanjang lima tahun tersebut.

b. Perhitungan Rasio Efisiensi untuk tahun anggaran 2019 sampai 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dinyatakan bahwa 3 tahun berada pada kriteria "Cukup Efisien" yaitu pada tahun 2020, 2022 dan 2023. Serta 2 tahun berada pada kriteria "Kurang Efisien" yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021. Dapat diartikan bahwa analisis kinerja keuangan untuk rasio efisiensi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kriteria "Cukup Efisien". Hal tersebut dapat dilihat dari lima tahun anggaran dalam periode penelitian 2019 hingga 2023 kondisi cukup efisien lebih dominan jika dibandingkan kondisi kurang efisien sehingga dapat disimpulkan untuk rasio efisiensi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun anggaran 2019 hingga 2023 cukup efisien.

c. Perhitungan Rasio Efektivitas untuk tahun anggaran 2019 sampai 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dinyatakan bahwa 3 tahun berada pada kriteria "Efektif" yaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2023. Serta 2 tahun berada pada kriteria "Sangat Efektif" yaitu pada tahun 2019 dan 2022. . Dapat diartikan bahwa analisis kinerja keuangan untuk rasio efektivitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam kriteria "Sangat Efektif". Hal tersebut dapat dilihat dari lima tahun anggaran dalam periode penelitian 2019 hingga 2023 dengan jumlah rata-rata 100,85% dapat disimpulkan untuk rasio efektivitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun anggaran 2019 hingga 2023 sangat efektif.

6. Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Dari hasil penelilitian ini menunjukan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023 berdasakan konsep *value for money* berada pada kriteria ekonomis, cukup efisien dan sangat efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terpacu untuk meningkatkan kinerja pada anggaran pendaptan dan belanjanya

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
ABSTRAK ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Kontribusi Penelitian 6
1.4.1 Konrtibusi Teoristis 6
1.4.2 Kontribusi Praktis 6
BAB II TELAAH PUSTAKA **7**
2.1 Tinjauan Teori 7
2.1.1 Teori Agensi 7
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik 8
2.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik 9
2.1.4 Organisasi Sektor Publik 9
2.1.5 Anggaran Sektor Publik 11
2.1.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 11
2.1.7 Kinerja Keuangan 12
2.1.8 Indikator Kinerja Keuangan 12
2.1.9 Pengukuran Kinerja 14
2.1.10 Tujuan Pengukuran kinerja 16
2.1.11 *Value For Money* 16
2.2 Kajian Empiris 19
2.3 Kerangka Konseptual 24

BAB III METODE PENELITIAN 25
3. 1 Bentuk Penelitian 25
3. 2 Tempat dan Waktu Penelitian 25
3. 3 Data 25
3. 4 Metode Analisis Data 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 29
4.1 Gambaran Umum 29
4.1.1 Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Barat 29
4.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 32
4.2 Analisis Data dan Pembahasan 32
4.2.1 Pengelolaan Data Anggaran 38
4.2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian 41
4.2.3 Perbandingan kinerja keuangan tahun 2019-2023 49
BAB V PENUTUP 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Keterbatasan Penelitian 51
5.3 Rekomendasi 52
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Derah Tahun 2019-2023……..4
Tabel 1. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023……..4
Tabel 2. 1 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan……...……...…....19
Tabel 2. 2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan…….……....20
Tabel 2. 3 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan…….……....21
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu…….…….....19
Tabel 4. 1 Data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019…….……32
Tabel 4. 2 Data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020…….……33
Tabel 4. 3 Data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021…….……35
Tabel 4. 4 Data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022…….……36
Tabel 4. 5 Data Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023…….……37
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Barat…….……..41
Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Barat…….……..43
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Barat…….……...……...46
Tabel 4. 9 Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023…….……...…..……...49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual ..... .24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019……...……..…..56
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020……...……..…..58
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021……...……60
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022……...……62
Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023……...……64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembahasan mengenai sektor publik di Indonesia tidak bisa lepas dari keuangan negara. Dalam beberapa waktu terakhir, kemajuan pesat dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia bersamaan diterapkannya otonomi daerah. Istilah otonomi daerah bukan lagi hal yang baru, otonomi daerah telah dinyatakan dalam Undang-Undang Konstitusi 1945. Berawal sejak bulan Januari 2001 hampir semua kewenangan Pemerintah Pusat dilimpahkan ke daerah. Namun ada beberapa bidang yang dikecualikan, yaitu Kebijakan Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Keadilan, Keuangan dan Agama. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Hak otonomi pada tiap masing masing daerah diberi kebebasaan dalam mengelola dan menambah sumber pendapatan daerah guna mendorong pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat tersebut. Tujuan dari otonomi daerah yaitu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di tingkat daerah, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya lebih efisien dan responsif terhadapat kebutuhan, potensi dan karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah dapat memberikan dampak yang bervariasi terhadap perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Pemerintah daerah wajib untuk melaporan pertangungjawaban kepada masyarakat, masyarakat akan menilai apakah manajemen keuangan pemerintah daerah bisa dikatakan sesuai atau tidak.

Dalam penerapan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang kendali penuh atas mengelola keuangan, termasuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah mengharuskan meraka untuk berperan secara aktif dalam merancang, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi kemajuan dan kesejahteraan wilayah masing-masing. Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah memegang tanggung jawab sepenuhnya untuk mengambil keputusan yang dapat berdampak langsung pada

pembangunan dan pengelolaan sumber daya di daerah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan yang bersifat administrarif, tetapi juga mencakup rencana pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran, yang dirumuskan berdasarkan kemampuan finansial dan persyaratan administratif yang berlaku. Peran aktif pemerintah daerah dalam merancang dan mengelola anggaran ini sangat penting, karena APBD adalah instrument utama yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu dalam penyusunan APBD dilakukan secara pertisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini bertujuan agar anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan pembangunan yang produktif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan mengelola anggaran secara efektif dan efisien, pemerintah tidak dapat hanya memperbaiki kinerja keuangan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonami daerah. Oleh karena itu pengelolaan yang tepat dan strategis terhadap anggaran daerah menjadi sangat krusial, agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Inilah mengapa perhatian terhadap aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan APBD harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah daerah.

Pegukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah perlu dilaksanakan guna untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, serta guna menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam usaha mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan sasaran. Kinerja pemerintah bukan hanya diukur keberhasilannya dari segi *output* yang diperoleh saja, namun juga memperhitungkan *input*, *output* dan *outcome*. Pengukuran kinerja pemerintah daerah yang didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa dilakukan dengan mengaplikasikan konsep *value for money*. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Agar pengelolaan dana publik *(public money)* dapat berjalan baik dan sejalan dengan prinsip *value for money*, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Sistem yang baik yang dimaksud yaitu harus mampu mengelola anggaran secara optimal, sehingga setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang signifikan. Metode *value for money* dalam pengelolaan anggaran daerah dapat terwujud jika pemerintah daerah mempunyai sistem akuntansi yang terstruktur dengan baik. Sistem akuntansi yang efektif akan memudahkan pemantauan dan pelaporan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap dana yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *value for money* berfungsi sebagai indikator yang dapat memberikan informasi tentang apakah anggaran (dana) menghasilkan manfaat atau nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator utama dalam konsep ini yaitu ekonomis, efisien dan efektif.

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Provinsi Kalimantan Barat, dengan segala potensi sumber daya alamnya yang melimpah dan keragaman budaya yang kaya, memiliki kesempatan unik untuk menjadi contoh dalam pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan pemerintah, khusunya melalui evaluasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Dalam lima tahun terakhir ini provinsi Kalimantan barat telah menghadapi dinamika yang sangat signifikan, termasuk perubahan kebijkan, fluktuasi ekonomi global, dan dampak pandemik COVID-19. semua ini tentunya sudah mempengaruhi cara pemerintah mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Sebab itu, penting untuk menggali lebih dalam mengenai kinerja keungan pemerintah daerah dengan berbasis pada tiga aspek utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efktivitas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat memegang peran yang sangat krusial dalam medukung kelancaran administrasi pemerintah di tingkat daerah. BKAD bertugas membantu gubernur dalam menjalankan berbagi fungsi pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam hal pengawasan keuangan dan aset daerah. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya adalah melalui analisis Laporan Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan konsep *value for money*. Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Kalimantan Barat bisa dilihat dari tabel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69
2020	5.799.686.674.152,69	5.665.113.367.860,80	97,68
2021	6.435.002.621.090,00	6.431.288.413.189,13	99,94
2022	5.658.492.045.088,00	6.103.471.493.098,21	107,86
2023	6.385.550.463.686,00	6.294.845.373.832,40	98,58

Sumber: Data Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 1. 2 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2019-2023

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36
2020	5.382.007.853.000,00	4.934.552.187.643,35	91,68
2021	6.693.021.789.008.00	6.303.146.996.599,88	94,17
2022	4.799.011.537.385,00	4.547.369.876.130,16	94,76
2023	5.570.336.552.741,00	5.274.194.818.543,20	94,68

Sumber: Data Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Mengacu pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa, Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019 sampai 2023 terjadi fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, Pendaptan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tercatat 100,69% dari target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah pada tahun yang sama hanya mencapai 91,36% dari anggaran yang disetujui. Pada tahun 2020, terjadi penurunan pada realisasi Pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan pencapaian sebesar 97,68%. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh ekonomi yang muncul sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu perekonomian daerah. Namun, meskipun terjadi penurunann dalam realisasi pendapatan, realisasi Belanja Daerah justru mengalami

sedikit peningkatan, tercatat sebesar 91,68%, yang menunjukkan usaha pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik meskipun dalam situasi yang tidak menentu.

Pada tahun 2021, baik Pendapatan maupun Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah tercatat terealaisasi sebesar 99,94% dari target yang ditetapkan, hanya sedikit kurang dari target, namun tetap menunjukan pencapaian yang hampir maksimal. Begitu pula dengan realisasi Belanja Daerah yang mencapai 94,17%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren positif berlanjut pada tahun 2022, dimana Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tercatat melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 107,865%. Di sisi lain, Belanja Daerah pada tahun tersebut terealisasi sebesar 94,76%. Pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali dalam realisasi baik Pendapatan maupun Belanja Daerah. Pendapatan daerah tetcatat sebesar 98,58%. Segitu juga dengan Belanja Dearh yang tercatat sebesar 94,68%, yang sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan diidentifikasi untuk di analisis:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek ekonomi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efesiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek ekonomi.

2. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efisiensi.
3. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019-2023 apabila menggunakan konsep *value for money*, dilihat dari aspek efektivitas.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitan diharapkan bisa memberikan konribusi sebagai berikut:

1.4.1 Konrtibusi Teoristis

Kontribusi teoritis menjelaskan mengenai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori dan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan dan sumber informasi bagi penulis maupun pembaca dalam memahami serta menganalisis kinerja keuangan daerah pendekatan *value for money.*

1.4.2 Kontribusi Praktis

a. Bagi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan dan mengambarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkulihan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan bagian dari usaha dalam melaksanakan dan menyelesaikan salah satu peryaratan akademik yang wajib dipenuhi untuk meraih gelar sarjana. Penelitian ini menjadi langkah penting dalam proses penyelesaian program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

b. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimtan Barat dari waktu ke waktu selama 5 Tahun, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terpacu untuk meningkatkan kinerja pada anggaran pendaptan dan belanjanya.